

# **BAB I**

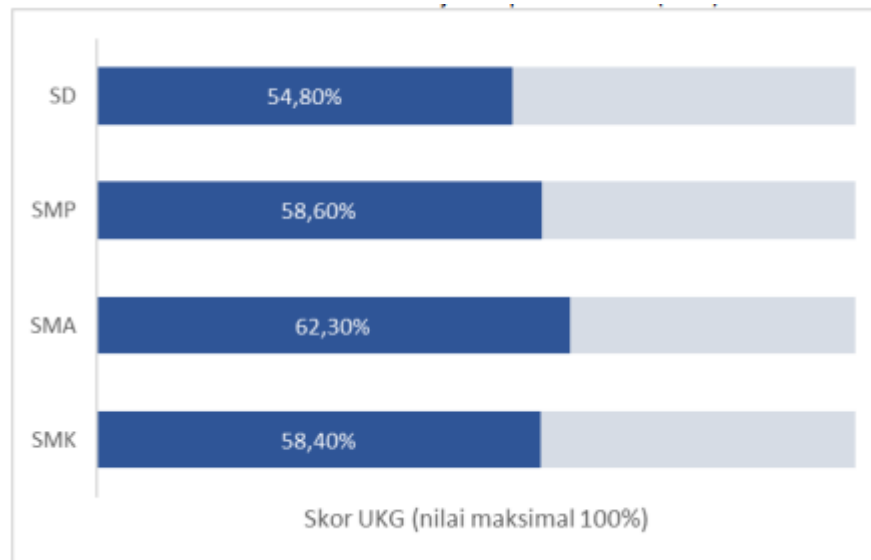
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan bidang yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses penyelenggaraan pendidikan manusia dapat secara aktif mengembangkan potensinya dengan ilmu pengetahuan, sikap dan teknologi yang dapat mengubah situasi dan kondisi seseorang dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas secara sinergis maka dibutuhkan sumber daya pendidikan yang memadai dalam mengelola sistem pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang memiliki peranan sangat penting dan secara fungsional bersentuhan langsung dalam menciptakan pendidikan yang lebih harmonis dan dinamis dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu keberlangsungan sistem pendidikan perlu dilakukan melalui proses manajemen yang matang mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi serta komunikasi yang baik. Mengingat bahwa tuntutan masyarakat dalam bidang pendidikan semakin tinggi, maka dari itu kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan yang ada.

Berkenaan dengan kualitas sumber daya pengajar di Indonesia saat ini, guru sebagai ujung tombak bagi keberhasilan pendidikan harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang menginspirasi dan signifikan, sehingga hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini seharusnya menjadi prioritas yang diutamakan pemerintah untuk mempersiapkan guru yang memiliki kompetensi tinggi dan keterampilan yang unggul. Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi berbagai program pengembangan dalam peningkatan kualitas guru.

Dari hasil uji kompetensi guru (UKG) beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil kompetensi guru yang masih rendah. Berikut diagram hasil rata-rata nilai uji kompetensi guru (UKG) tahun 2019:



**Gambar 1.1 Rata-Rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019**

*(Sumber: Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024)*

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui hasil Uji Kompetensi Guru yang diterapkan pada guru-guru Indonesia menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan. Pada UKG tahun 2019, nilai rata-rata terendah yang diraih oleh guru jenjang SD adalah 54,8, sedangkan guru jenjang SMA mencapai nilai rata-rata tertinggi sebesar 62. Secara keseluruhan, nilai rata-rata UKG hanya mencapai 57 dari nilai maksimal 100. Situasi ini berdampak pada rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik di Indonesia. Aspek pedagogik dan efektivitas pengajaran dari para guru masih memerlukan perbaikan. Banyak guru yang lebih berperan sebagai penyampai informasi daripada sebagai fasilitator pembelajaran. Terdapat indikasi bahwa banyak guru yang tidak memprioritaskan pengembangan karakter dan kurang dalam membangkitkan motivasi belajar. (Renstra Kemdikbud Tahun 2020-2024).

Selain itu disampaikan oleh Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Santi Ambarukmi, mengatakan skor PISA Indonesia masih rendah. Hasil survei PISA 2018 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-74, yang berarti berada di posisi keenam dari bawah. Dalam kemampuan membaca, siswa Indonesia meraih skor 371, sehingga menempati posisi ke-74. Untuk kemampuan matematika, Indonesia meraih skor 379 yang menempatkannya di posisi ke-73. Sementara itu, dalam kemampuan sains, Indonesia mencapai skor 396 dan berada di posisi ke-71. (kemdikbud.go.id, 2022). Hal ini secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kompetensi guru di Indonesia.

Dari informasi yang telah disampaikan, tampak bahwa tingkat profesionalisme guru di Indonesia masih dapat dianggap relatif rendah. Hal itu menunjukkan sangat jelas bahwa guru memerlukan bantuan dan dukungan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas profesional mereka agar dapat memberikan layanan pendidikan yang unggul kepada peserta didik. Salah satu cara efektif untuk memberikan bantuan tersebut adalah melalui supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas sekolah secara sistematis dan berkelanjutan. Keberadaan pengawas sekolah dapat menjadi konselor sekaligus inspirator bagi dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas mengajar.

Pengawas sekolah sebagai salah satu tenaga fungsional kependidikan memiliki tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya). Dalam hal ini pengawas sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui program pembinaan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru oleh pengawas sekolah terhadap wilayah sekolah binaan dapat memberikan dampak yang signifikan

terhadap pengembangan dan peningkatan kompetensi guru maupun kepala sekolah sehingga menghasilkan *output* atau prestasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Peran utama dari pengawas pendidikan yang ideal adalah memiliki kemampuan untuk menyediakan solusi alternatif dalam proses pembelajaran, sejalan dengan peran yang dijelaskan oleh Wiles & Bondi (dalam Dedi Iskandar & Udik Budi Wibowo, 2016, hlm. 180) bahwa peran pengawas pendidikan adalah “...to help teachers and other education leaders understand issues and make wise decisions affecting student education”. Pendapat tersebut dapat diartikan peran pengawas pendidikan adalah untuk memberikan dukungan kepada guru dan para pemimpin pendidikan dalam memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan serta dalam mengambil keputusan yang bijak yang berdampak pada pendidikan siswa. Peran pengawas pendidikan memiliki signifikansi yang strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pengawas mencakup berbagai aspek, seperti memberikan bimbingan, pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, penyusunan laporan, dan tindak lanjut hasil supervisi. Melalui peran ini, pengawas berkontribusi dalam mengarahkan dan memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta berfokus pada hasil yang bermanfaat bagi siswa.

Dalam pelaksanaannya, masih muncul berbagai permasalahan yang terkait dengan kegiatan pengawasan pendidikan. Permasalahan ini dapat berasal dari pengawas sekolah itu sendiri (faktor internal) maupun dari faktor-faktor yang berada di luar kendali pengawas (faktor eksternal). Faktor-faktor ini kemudian menjadi hambatan bagi pengawas dalam usaha meningkatkan profesionalisme guru. Kendala-kendala itu, Menurut Israpil (dalam Rispa Ngindana, dkk, 2022, hlm. 24), antara lain : Masih terdapat pengawas yang belum sepenuhnya menyadari dan mengemban tanggung jawabnya secara serius dalam menjalankan tugas. Beberapa di antara mereka kurang memiliki kemampuan profesional dalam bidang pengawasan (supervisi). Beberapa pengawas mungkin diangkat semata untuk memperpanjang masa kerja sebelum pensiun, yang mengakibatkan kinerja mereka tidak optimal. Fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan tugas pengawasan

masih terbatas. Kesejahteraan pengawas yang minim juga berdampak pada kualitas kinerja dalam tugas pengawasan.

Kemudian, permasalahan lain yang masih perlu dibenahi dari pemenuhan tugas pokok pengawas sekolah adalah terkait pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh pengawas. Banyak pengawas masih belum optimal dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru di sekolah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh para pengawas tersebut. belum begitu terampil, meskipun ada juga yang sudah terampil hal ini masih belum memadai. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pembinaan terhadap guru disekolah sehingga mutu pendidikan kita tidak berkembang (Putri Setyawati, dkk, 2020, hlm. 9120).

Di sisi lain, salah satu yang menjadi masalah utama Pengawas sekolah memiliki perbedaan latar belakang pendidikan dengan guru yang disupervisi dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya spesifikasi jurusan khusus dalam pengangkatan pengawas oleh pemerintah, sehingga pengawasan cenderung bersifat administratif dan kurang memiliki dimensi substansial. Seharusnya, pengawas pendidikan dapat mengawasi guru-guru sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang sama, sehingga mereka dapat aktif dalam memantau proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, pengawas juga perlu mampu membuat peta konsep mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru dalam mengajarkan indikator pelajaran kepada peserta didik, serta memberikan bimbingan kepada guru dalam aspek administrasi pelajaran dan pengelolaan kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. (Dedi Iskandar & Udik Budi Wibowo, 2016, hlm. 181).

Selain itu, Permasalahan lain yang seringkali ditemui di lapangan yaitu terkait kekurangan formasi pengawas sekolah dan/atau pendistribusian pengawas sekolah pada suatu lembaga pendidikan yang kurang merata. Dilansir dari situs [gurudikdas.kemdikbud.go.id](http://gurudikdas.kemdikbud.go.id) diketahui data pengawas Sekolah Dasar di Indonesia per 30 Maret 2022 sebanyak 9.636. Selanjutnya berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 9.624 pengawas satuan pendidikan, dan 12 pengawas mata pelajaran. Berdasarkan kualifikasi pendidikan terbagi menjadi 28 (S3), 3.280 (S2), 5.974 (S1/D4), dan

sisanya belum S1. Sedangkan klasifikasi berdasarkan kelompok usia sebanyak 9.146 berusia > 50, 469 berusia 40 – 50 tahun, dan 21 berusia < 40 tahun. Dengan pangkat golongan tertinggi terletak pada golongan IV/b sebanyak kurang lebih 6000 pengawas (Direktorat Guru Pendidikan Dasar – Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Data jumlah pengawas sekolah tersebut tidak sebanding dengan jumlah sekolah dasar dan guru yang harus dibina. Diketahui data jumlah Sekolah Dasar dan Guru SD di Indonesia tahun ajaran 2022/2023 semester genap sebanyak 149.520 SD dan 1.453.268 Guru SD. Dari jumlah data tersebut dapat terlihat bahwa formasi pengawas sekolah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan ([dapo.kemdikbud.go.id](http://dapo.kemdikbud.go.id)).

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis intensitas kunjungan kunjungan yang masih minim atau kurang merata pada sekolah binaan disebabkan salah satunya oleh kurangnya sumber daya manusia (pengawas sekolah) memungkinkan kurang optimalnya peranan pengawas sekolah dalam melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pembuatan laporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak optimal dapat berdampak pada keterbelakangan mutu pendidikan.

Kondisi pengawas Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Barat pada saat ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan deskripsi sebelumnya yang telah diuraikan diatas. Mengacu pada situs [gurudikdas.kemdikbud.go.id](http://gurudikdas.kemdikbud.go.id) diketahui data pengawas Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Barat sejumlah 1.398, sedangkan jumlah Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Barat sejumlah 19.765 dan jumlah guru yang harus dibina sejumlah 193.254.

Secara detail kondisi sebaran sekolah dasar, guru, dan pengawas pada lokus penelitian di Kota Bogor dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Sebaran Sekolah Dasar, Guru, dan Pengawas di Kota Bogor**

No	Wilayah	Sekolah Dasar	Guru	Pengawas Sekolah
1	Kecamatan Bogor Barat	68	1.184	3
2	Kecamatan Bogor	52	857	2

	Selatan			
3	Kecamatan Bogor Utara	41	802	2
4	Kecamatan Bogor Tengah	42	655	2
5	Kecamatan Bogor Timur	31	666	1
6	Tanah Sereal	48	517	3
<b>Jumlah</b>		<b>282</b>	<b>4.681</b>	<b>13</b>

(Sumber: [www.dapo.kemdikbud.go.id](http://www.dapo.kemdikbud.go.id))

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sebaran wilayah di kota Bogor terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan total jumlah sekolah sebanyak 282, guru sebanyak 4.681, dan pengawas sekolah sebanyak 13 (tiga belas) dimana berdasarkan data sebaran di atas diketahui jumlah sekolah dasar dan guru terbesar berada di wilayah kecamatan Bogor Barat sejumlah 68 sekolah dan 1.184 guru.

Dalam hal ini dapat dianalisis kondisi lokus penelitian berdasarkan studi pendahuluan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pengawas sekolah dasar Ibu Rina di Dinas Pendidikan Kota Bogor secara langsung pada saat praktik Intership Supervisi Pendidikan yang dilaksanakan pada bulan Februari s.d Juni 2022, ditemukan beberapa fenomena yang terjadi ketika melaksanakan tugasnya, kehadiran pengawas pada sekolah binaan cenderung lebih berorientasi pada aspek kepengawasan (kontrol) terhadap kegiatan manajerial sekolah dibandingkan melakukan pembinaan akademik terhadap guru. Sehingga, hanya beberapa guru saja yang mendapatkan pembinaan dan pembimbingan secara langsung oleh pengawas sekolah dan seringkali dilaksanakan dalam KKG Gugus atau Kecamatan. Intensitas kunjungan pengawas sekolah pada sekolah binaan untuk melaksanakan supervisi akademik terhitung pasif, idealnya adalah dalam satu bulan sekali dilakukan supervisi akademik oleh pengawas sekolah dengan berkunjung pada setiap sekolah binaan. Akan tetapi pada lokus penelitian, dalam pelaksanaannya pembinaan atau supervisi oleh pengawas sekolah tidak selalu dilakukan setiap bulan secara rutin. Supervisi biasanya dilakukan ketika ada permintaan bantuan dari kepala sekolah atau ketika terjadi permasalahan yang memerlukan bimbingan khusus bagi guru tertentu.

Hal ini disebabkan karena ketersediaan sumber daya manusia pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor tidak sebanding dengan jumlah

sekolah yang harus dibina, hal ini berakibat pada cakupan pekerjaan pengawas sekolah yang meluas, menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Diketahui bahwa pengawas sekolah dasar yang bersangkutan membina 2 gugus dengan jumlah 22 sekolah binaan.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, aturan beban kerja dan pengaturan tugas pengawas sekolah sudah di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya beban kerja dan pengaturan tugas Pengawas Sekolah disebutkan bahwa beban kerja Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah 37,50 jam perminggu di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah binaan dengan sasaran diatur bagi setiap pengawas sekolah untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal (TK/RA) dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru.

Ketentuan pengaturan beban kerja pengawas diatas dinilai masih belum cukup untuk memenuhi seluruh tugas pokoknya. Hal ini dapat dirasakan oleh pengawas sekolah karena beberapa gejala yang terjadi dalam situasi di lapangan, salah satunya adalah pandangan bahwa beban kerja 37,5 jam per minggu. tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh tugas yang diemban jika dibandingkan dengan jumlah proporsi sekolah dan guru yang harus dibina oleh pengawas di lapangan lebih luas dari ketetapan ideal, namun, dengan adanya kewenangan bagi pengawas untuk mengatur sendiri jam kerjanya, sejumlah pengawas sekolah terkadang mengabaikan tugas pokok kepengawasan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tingkat keseimbangan proporsi beban kerja yang ditanggung seseorang secara langsung akan berdampak pada kinerja yang dihasilkan. Proporsi beban kerja yang tidak seimbang melebihi atau ketidakseimbangan beban kerja yang kurang sebanding



dengan kemampuan pegawai akan berpengaruh pada efisiensi kinerja yang dihasilkan tidak akan maksimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengawas Sekolah membutuhkan sumber daya yang memiliki profesional dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepengawasannya secara menyeluruh untuk memantau pelaksanaan dan pembinaan terkait tata cara, aspek teknis, administrasi, serta pekerjaan serupa di satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal ini harus dilakukan dengan kompetensi, kualitas, dan semangat kerja yang tinggi, dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan dalam mencapai target yang telah ditetapkan., dibutuhkan perencanaan formasi pengawas sekolah sumber melalui analisis realisasi beban kerja, ini penting agar pengawas dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja).

Berdasarkan uraian latar belakang dan studi pendahuluan diatas perlu diteliti lebih jauh bagaimana beban kerja pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Realisasi Beban Kerja dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini akan dibatasi pada Analisis Realisasi Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Adapun batasan masalah secara konseptual dan kontekstual, sebagai berikut:

#### **a. Batasan Konseptual**

Secara konseptual, dari permasalahan yang ada, dilakukan analisis kebutuhan pegawai dengan berfokus pada aspek kuantitas, yang dilandaskan pada perhitungan beban kerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

#### **b. Batasan Kontekstual**

Secara kontekstual, penelitian ini dibatasi oleh analisis implementasi uraian tugas dan produk kerja dan analisis realisasi beban kerja, serta menghitung formasi pengawas di Dinas Pendidikan Kota Bogor khususnya pengawas sekolah pada jenjang Sekolah Dasar.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang, rumusan masalah diciptakan sebagai panduan dalam menggambarkan permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Untuk membatasi lingkup permasalahan yang akan diteliti, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana gambaran uraian tugas dan produk kerja sebagai hasil dari analisis jabatan Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor?
2. Bagaimana gambaran kondisi beban kerja sebagai hasil analisis beban kerja Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor?

3. Bagaimana formasi Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor yang efektif berdasarkan hasil analisis realiasi beban kerja yang ada di lapangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan, dan tujuannya antara lain:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Realisasi Beban Kerja dan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun secara khusus tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mendapatkan bukti autentik mengenai:

1. Memperoleh gambaran informasi uraian tugas dan produk kerja sebagai hasil dari analisis jabatan Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor.
2. Memperoleh informasi kondisi beban kerja sebagai hasil analisis beban kerja Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor.
3. Memperoleh jumlah formasi Pengawas Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bogor yang efektif berdasarkan hasil analisis implementasi beban kerja yang ada di lapangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Pendidikan terkait dengan bidang Manajemen Pendidikan, khususnya dalam manajemen personalia pendidikan, terutama pada aspek perencanaan pegawai, lebih tepatnya perencanaan pengawas sekolah. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan dalam menghitung proyeksi kebutuhan pengawas sekolah yang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang optimal.

#### **1.4.2 Secara Kebijakan**

Dapat memberikan arahan yang berharga dalam proses pengambilan kebijakan terkait pengembangan pendidikan. Hal ini mencakup berbagai keputusan yang dapat memperbaiki dan memajukan sistem pendidikan. Selain bagi kebijakan, penelitian ini juga diharapkan memberikan panduan yang bermanfaat bagi lembaga pendidikan dalam upaya memenuhi kebutuhan nyata pengawas sekolah dasar, sehingga efektivitas pengawasan terhadap proses pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan beban kerja di lapangan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

#### **1.4.3 Secara Praktis**

Adapun secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi peneliti, diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang ilmu Administrasi Pendidikan tentang perhitungan proyeksi kebutuhan pengawas sekolah dasar berdasarkan analisis beban kerja.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat operasional yang konkret dan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait dengan pemenuhan dan penataan Pengawas Sekolah Dasar.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pembaca dalam memahami isi skripsi yang akan dibuat, peneliti mengurutkan sistematika skripsi berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7867/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2021. Struktur sistematika penelitian ini meliputi:

## **1. BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab awal ini berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan konteks serta kepentingan dari pelaksanaan penelitian ini. Bagian awal ini memuat penjelasan mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian yang dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, dan juga rincian mengenai struktur organisasi yang akan diikuti dalam penyusunan skripsi.

## **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menjelaskan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, dengan merujuk pada sumber-sumber seperti buku dan literatur lain yang mendukung. Selain itu, bagian ini juga berisi tinjauan pustaka yang melibatkan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta pengaturan kerangka kerja penelitian.

## **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi penjelasan mengenai metodologi yang digunakan oleh peneliti, diantaranya desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, teknik penggalan data, prosedur pengolahan data, definisi konseptual dan operasional, kisi-kisi dan instrument penelitian, jadwal penelitian, serta biaya penelitian.

## **4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menguraikan temuan-temuan penelitian yang muncul setelah melakukan proses pengolahan dan analisis data di lapangan. Hasil ini dipaparkan dan dibahas oleh peneliti dalam bentuk pemaparan yang detail, termasuk dalam pembahasan data penelitian.

## **5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

Merupakan bab yang menguraikan penjelasan mengenai penafsiran dan pemaknaan disamping itu, bab ini juga mencakup implikasi dan rekomendasi yang dihasilkan oleh peneliti berdasarkan temuan dan analisis penelitian.